

ABSTRAK

KANIA ENDAH SARI. *Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.* Skripsi. Jakarta: Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN). Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Jakarta. Juni 2016.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang mendalam serta data dan fakta yang empiris, mengenai hak dan kewajiban Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sebagai warga negara dalam implemantasi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum pada masa Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kala. Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan, terhitung dari Maret hingga Mei 2016.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara informan dan *key informan* pada saat penelitian, triangulasi dengan *expert opinion*, kemudian dianalisis secara deskriptif, dan selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemerintah belum sepenuhnya memberikan perlindungan hak warga negara dalam kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, karena warga negara atau dalam penelitian ini yaitu KSPI belum merasakan kebebasan dalam pelaksanaan unjuk rasa. Selain itu dalam pelaksanaan kewajiban warga negara dalam kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum yang dilakukan oleh KSPI secara umum telah dilakukan sesuai dengan Undang-Undang, walaupun masih terdapat beberapa hal yang belum sepenuhnya terimplementasikan dengan baik. Dengan demikian, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum belum diimplementasikan sesuai dengan prinsipnya.

Kata Kunci: Implementasi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998, Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Hak dan Kewajiban Warga Negara.